



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU GATUT PURBOYO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 469678

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **170.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPERCUP C700 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
6. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000



7. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 48.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 30.000.000

Sub Total Rp. 3.168.000.000

III. HUTANG Rp. 255.199.103

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.912.800.897

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.